

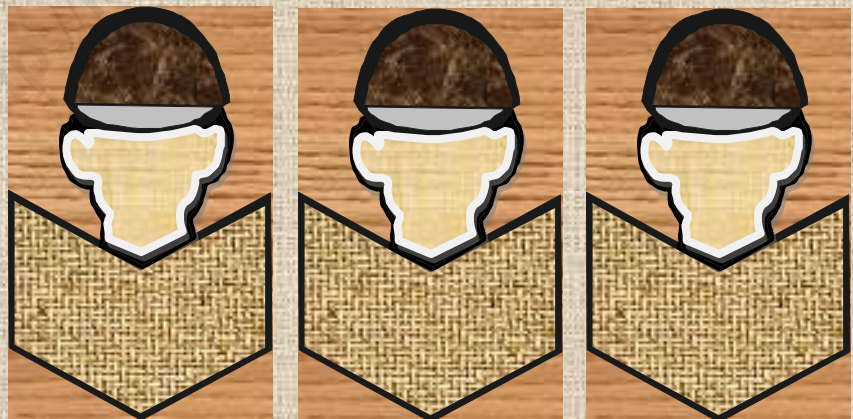


Katalog BPS : 4102007.1211
No. Publikasi : 12115.11.06

ANALISA I P M

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

*Kabupaten Karo
Tahun 2011*



Kerjasama Penyusunan dengan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO

ANALISA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN KARO TAHUN 2011

- Katalog BPS** : 4102007.1211
- Nomor Publikasi** : 12115.11.06
- Naskah** : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
- Tim Penyusun Naskah** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karo
- Gambar Kulit** : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
- Tata Letak** : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
- Diterbitkan oleh** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karo Kerjasama Dengan Badan
Pusat Statistik Kabupaten Karo
- Sumber Dana** : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya, Publikasi “Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tahun 2011” dapat terselesaikan. Publikasi ini memuat ukuran-ukuran komposit pada umumnya dimana indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia.

Publikasi ini dilengkapi dengan tabel-tabel statistik yang memuat beragam informasi. Untuk itu, Publikasi ini merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam membangun suatu konsensus untuk memperbaharui komitmen bersama dan membuat kebijakan yang tepat terhadap pembangunan manusia khususnya yang ada di daerah ini.

Indikator-indikator yang dimuat dalam penyusunan Analisa IPM ini diharapkan bermanfaat bagi para perencana dalam penyusunan program pembangunan manusia dan dipakai sebagai parameter untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan edisi yang akan datang.

Kabanjahe, September 2011

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO
Kepala,**



**DONI BUKIT, SE.
NIP. 19600618 198101 1 001**

**Plh. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KARO**



**ABEL TARWAI TARIGAN, S.Sos, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19740315 199303 1 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Penulisan	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	6
1.4. Sumber Data.....	6
BAB 2. METODOLOGI PENGHITUNGAN.....	9
2.1. Pengertian.....	10
2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	10
2.3. Penyusunan Indeks.....	11
BAB 3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	13
3.1. Komponen-Komponen IPM	14
3.2. Status Pembangunan Manusia.....	23
3.3. Hubungan IPM dengan Pembangunan Ekonomi	28
BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	34
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.....	37
TABEL-TABEL	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Angka Melek Huruf Kabupaten Karo dan Sumatera Utara Tahun 2009 dan 2010	15
Tabel 3.2.	Perkembangan Status Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo dan Sumatera Utara Tahun 2004-2010	26
Tabel 3.3.	Perkembangan IPM dan PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Karo dan Sumatera Utara Tahun 2004-2010	30
Tabel 3.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Karo dan Sumatera Utara Tahun 2004-2010	33
Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010	40
Tabel 2.	Jumlah dan Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010	41
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010	42
Tabel 4.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2010	43

Tabel 5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama Selama Seminggu Terakhir Tahun 2010.....	44
Tabel 6.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 1993-2010.....	45
Tabel 7.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, Aktivitas Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	46
Tabel 8.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	47
Tabel 9.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	48
Tabel 10.	Persentase Penduduk Berdasarkan Ada Tidaknya Mendapat Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010.....	49
Tabel 11.	Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	50
Tabel 12.	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jumlah Hari Sakit dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	51
Tabel 13.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2010.....	52

Tabel 14.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2010.....	53
Tabel 15.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita/ Bulan Tahun 2010.....	54
Tabel 16.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapaita/ Bulan Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Per Kapita/ Bulan Tahun 2010	55
Tabel 17.	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai (m2) Tahun 2010.....	56
Tabel 18.	Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2010	57
Tabel 19.	PDRB dan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010.....	58
Tabel 20.	Perkembangan IPM dan Komponennya Kabupaten Karo Tahun 2009-2010.....	59
Tabel 21.	IPM Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2010	60
Tabel 22.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain Di Sumatera Utara Tahun 2010	61
Tabel 23.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain Di Sumatera Utara Tahun 2010	62

Tabel 24.	Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain Di Sumatera Utara Tahun 2010	63
Tabel 25.	Pengeluaran Riil/ Kapita Disesuaikan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain Di Sumatera Utara Tahun 2010.....	64

<http://karokab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota di Tahun 2010	15
Grafik 3.2. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2010	16
Grafik 3.3. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara Menurut kabupaten/ Kota Tahun 2010	18
Grafik 3.4. Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010	19
Grafik 3.5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2010	20
Grafik 3.6. Pengeluaran Riil Per Kapita Penduduk Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2010	21
Grafik 3.7. Perkembangan IPM Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2010	25
Grafik 3.8. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010	27

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Tujuan Penulisan**
- 1.3. Sistematika Penulisan**
- 1.4. Sumber Data**

B A B I

<http://karokab.bps.go.id>



BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan?

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human



Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (enlarging the choices of the people). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.



Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isue pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat



tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisa IPM tahun 2011. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangan IPM juga digunakan data IPM pada tahun sebelumnya. Selain itu publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM. Secara khusus, publikasi ini bertujuan:

1. Menyajikan perkembangan IPM selama tujuh tahun terakhir
2. Menyajikan analisis perbandingan IPM dan komponennya antar kabupaten/ kota se-provinsi Sumatera Utara.



1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan hasil-hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Kemudian Bab IV menyimpulkan serta rekomendasi kepada pemerintah daerah.

1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Sementara sebagai penunjang digunakan data Supas, Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (eo) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (purchasing power parity) dihitung menggunakan data Susenas modul Konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi dan Susenas Kor untuk



mendapatkan pengeluaran per kapita. Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

<http://karokab.bps.go.id>

METODOLOGI PENGHITUNGAN

2.1. Pengertian

2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3. Penyusunan Indeks

B A B II

BAB II.

METODOLOGI PENGHITUNGAN

2.1 Pengertian

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke-empat komponen, yaitu Angka Harapan Hidup yang mewakili bidang kesehatan; Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh 175 negara di dunia. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

2.2.2 Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100

persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

2.2.3 Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

2.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksnya dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (eo, Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut :

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

X_i = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-I (i=1,2,3)

X_{min} = Nilai minimum X_i

X_{maks} = Nilai maksimum X_i

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

2. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia - IPM} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \end{aligned}$$

dimana :

$X(1)$ = Indeks Angka Harapan Hidup

$X(2)$ = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$ = Indeks Konsumen per kapita yang disesuaikan

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

No	Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
2.	Angka Melek Huruf (%)	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
4.	Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Rp.)	732.720	300.000	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1. *Komponen-Komponen IPM*

3.2. *Status Pembangunan Manusia*

**3.3. *Hubungan IPM dengan Pembangunan
Ekonomi***

**B
A
B**

III



BAB III

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

3.1 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

3.1.1 Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar dan mulai tahun 1994 meningkat menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga telah banyak upaya pemerintah dalam upaya melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Karo yang telah bertekad memberhasikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya aspek pendidikan.

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2010 angka melek huruf penduduk Kabupaten Karo telah mencapai 98,69 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 97,32 persen. Tabel 3.1. menyajikan angka melek huruf selama dua

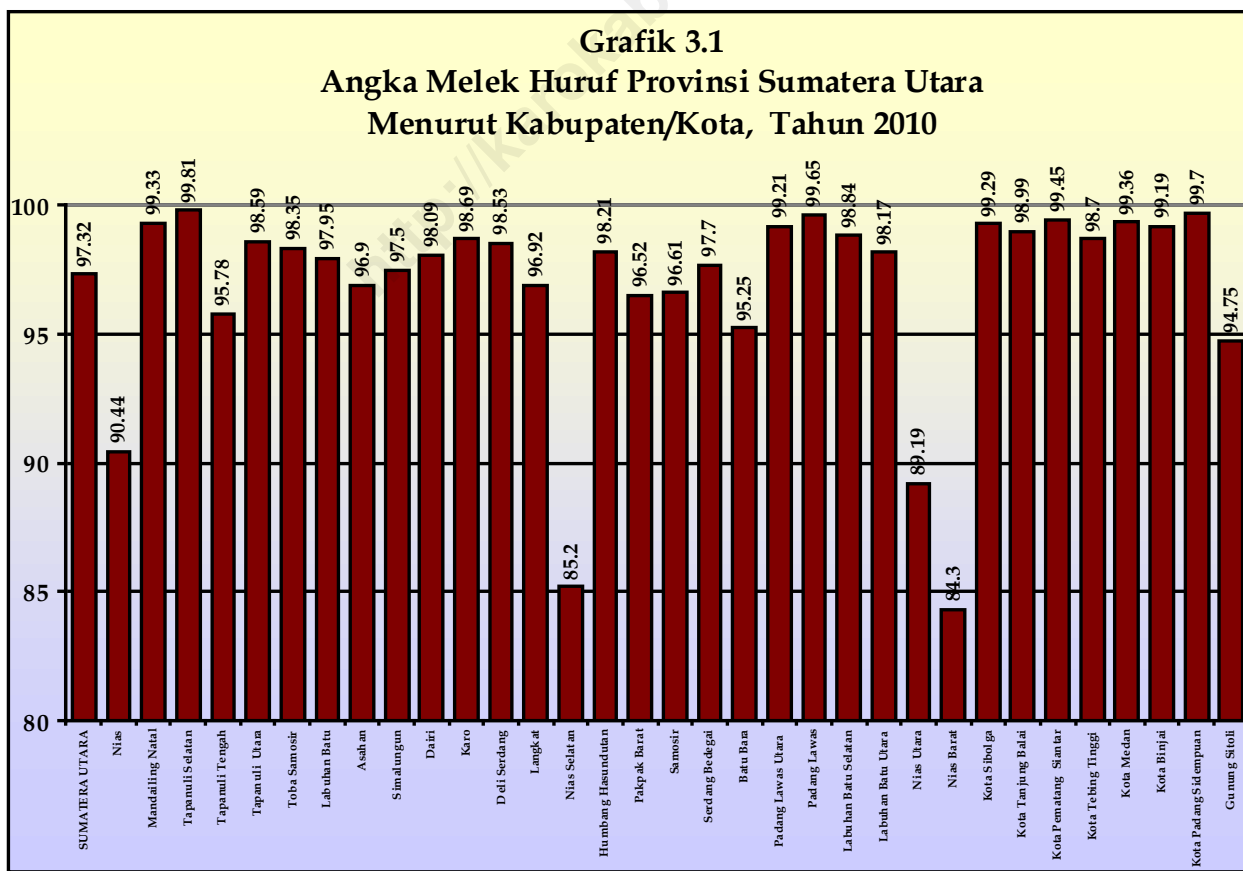


tahun terakhir Kabupaten Karo dan Sumatera Utara sebagai bahan perbandingan.

Tabel 3.1.
Angka Melek Huruf Kabupaten Karo dan Sumatera Utara Tahun 2009 dan 2010

Jenis Kelamin	Karo	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2009	98,69	97,15
2010	98,69	97,32

Sumber : Susenas 2009, 2010
BPS Kabupaten Karo





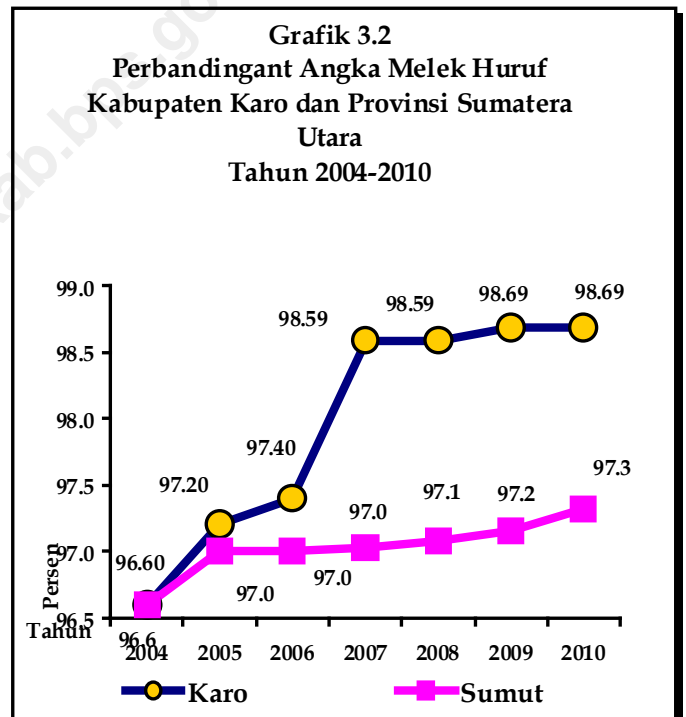
Salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung IPM adalah angka melek huruf yang menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Dari grafik 3.1 memperlihatkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Karo pada tahun 2010 sebesar 98,69 persen, di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 97,32 persen dan berada pada peringkat ke-13 bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Dari ulasan di atas berarti masih terdapat sekitar 1,31 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu faktor penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan

adalah penduduk lanjut usia yang lahir disaat pembangunan belum sebaik sekarang ini.

Lebih lanjut bila dilihat pada grafik 3.2, penduduk umur 15 tahun ke atas menurut angka melek huruf Kabupaten Karo dan Sumatera Utara pada tahun





2004 sama besarnya (96,6 persen). Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya persentase melek huruf Kabupaten Karo selalu lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Utara.

Indikator pendidikan selain melek huruf yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa.

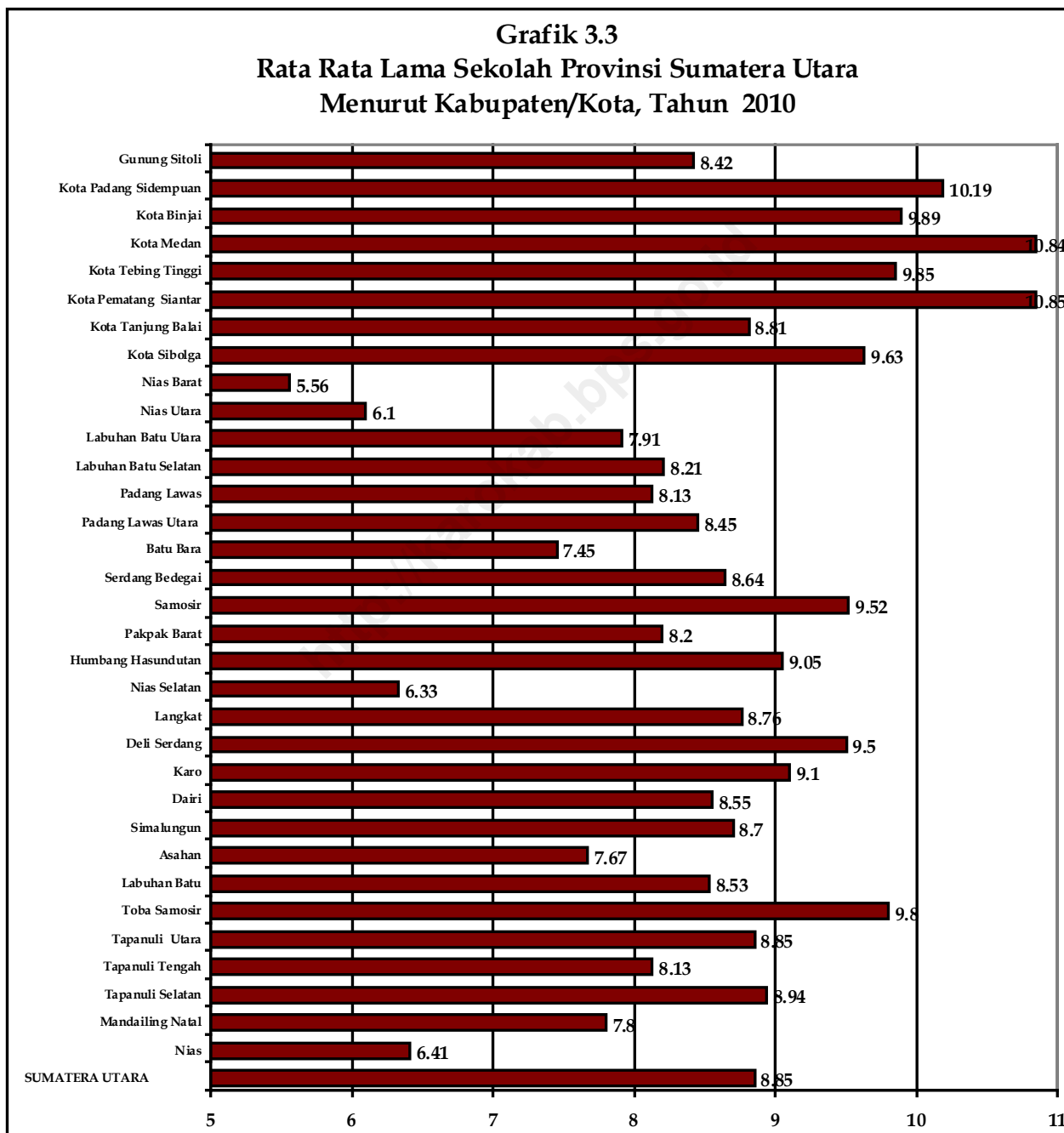
Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo sebesar 9,10 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, angka tersebut sedikit mengalami peningkatan, dan bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara angka tersebut berada di atas angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 8,85 tahun. Namun bila kita lihat kabupaten/kota lain di Sumatera Utara, secara peringkat masih berada di peringkat ke-10 di antara kabupaten/kota lain di Provinsi ini.

Sebagai bahan tambahan berikut disajikan penduduk 10 tahun ke atas Kabupaten Karo menurut aktivitas pendidikannya. Pada tahun 2010, sebanyak 20,60 persen penduduk usia 10 tahun ke atas Kabupaten Karo masih sekolah, 77,20 persen tidak sekolah lagi dan 2,18 persen tidak/belum bersekolah.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan yang masih sekolah (19,05 persen) lebih rendah jika dibandingkan persentase laki-laki yang masih sekolah (22,13 persen). Sebaliknya untuk aktivitas penduduk



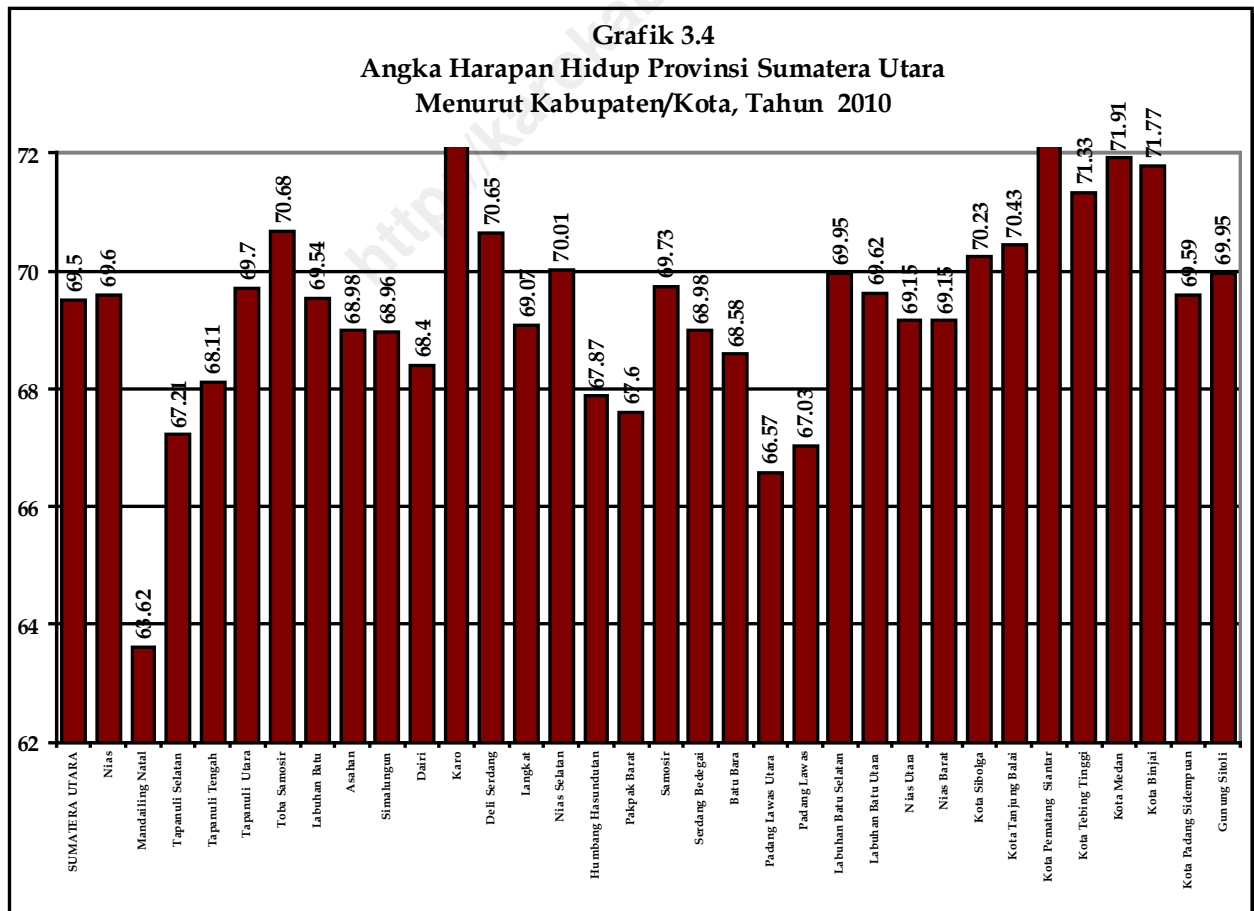
”tidak/belum pernah sekolah”, persentase wanita lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 3,06 persen berbanding 1,34 persen.





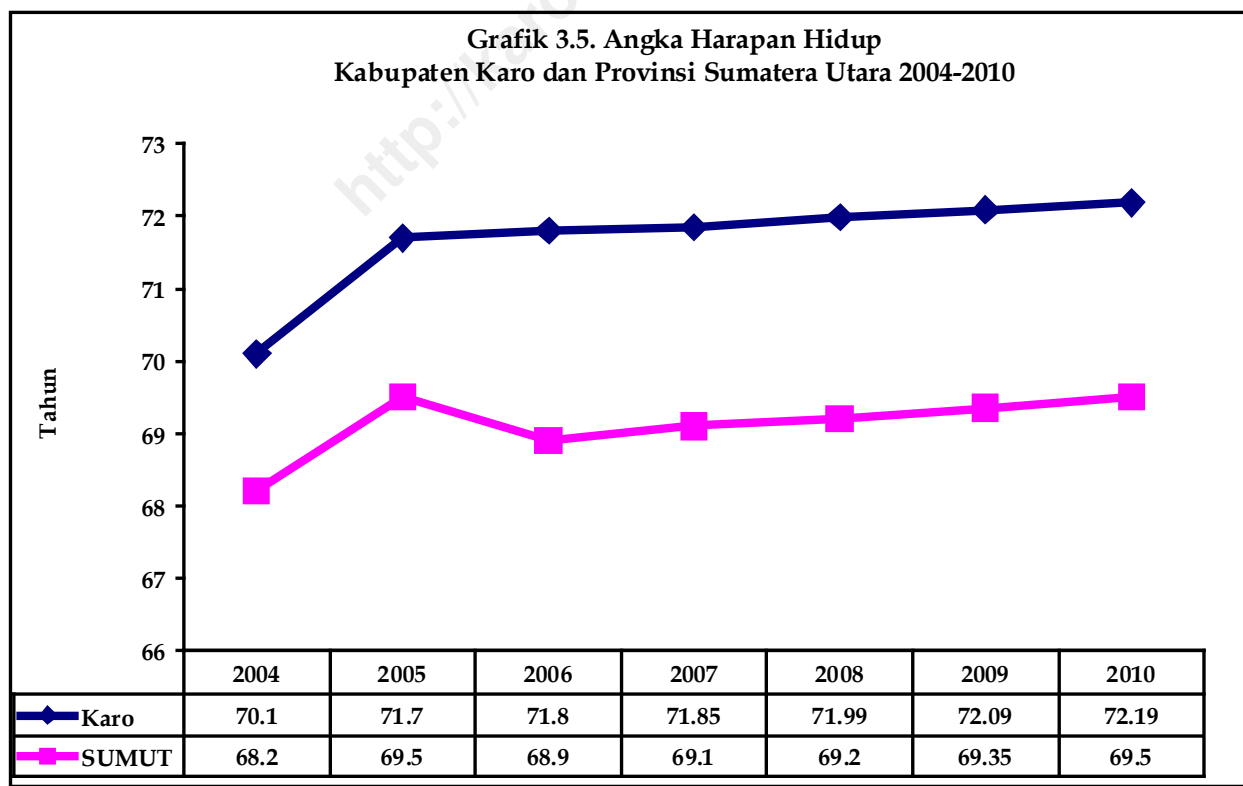
3.1.2 Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin baik.





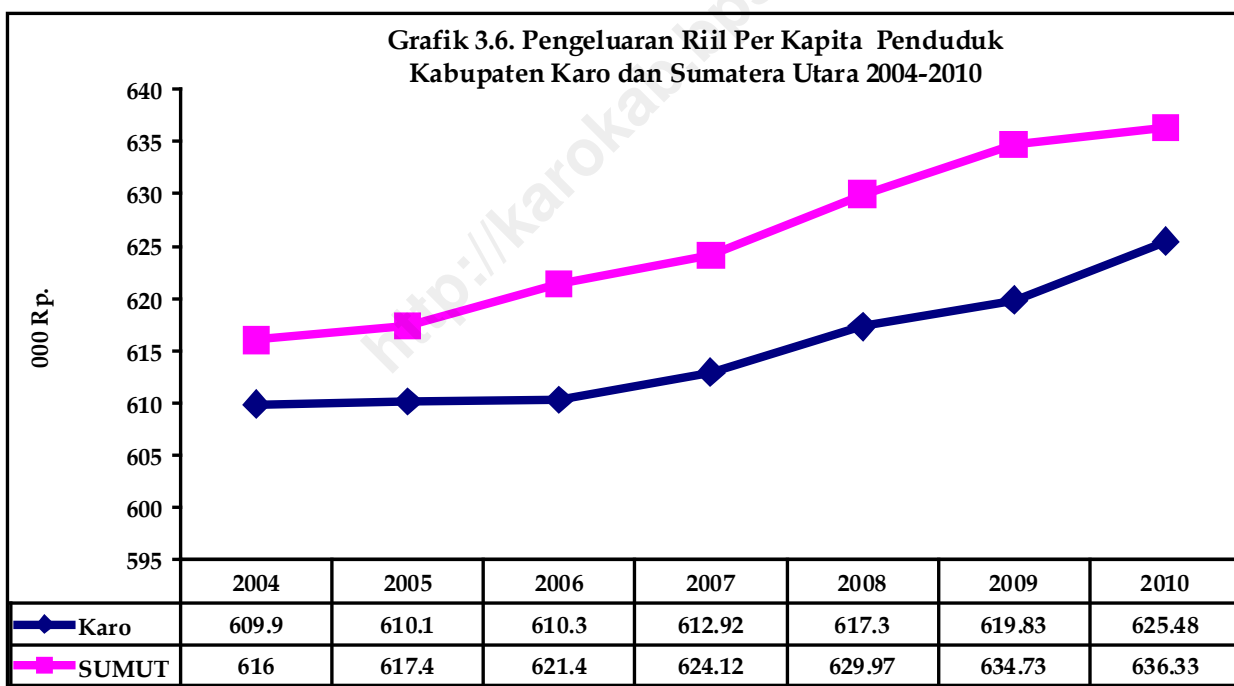
Angka harapan hidup di Kabupaten Karo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2010 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Karo 72,19 tahun yang berarti penduduk Kabupaten Karo yang baru lahir pada tahun 2010 mempunyai harapan yang besar untuk mencapai umur 72,19 tahun. Angka harapan hidup tersebut meningkat dari 72,09 tahun pada tahun 2009. Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara secara umum penduduk Kabupaten Karo mempunyai peluang untuk hidup lebih panjang dari penduduk Sumatera Utara. Angka harapan hidup di Kabupaten Karo menempati peringkat pertama di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.





3.1.3 Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam memproduksi berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing.



Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang



sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda. Oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 diyakini meningkatkan penduduk miskin dan tentunya menurunkan daya beli penduduk. Namun seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif, berdampak kepada meningkatnya daya beli penduduk Kabupaten Karo khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Pada tahun 2009 tingkat daya beli penduduk Kabupaten Karo sebesar 619,83 ribu rupiah. Pada tahun 2010 daya beli penduduk Kabupaten Karo meningkat menjadi 625,48 ribu rupiah.

Sebagai perbandingan, jika kita lihat kondisi di Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Karo masih lebih rendah dibanding kondisi di Sumatera Utara. Seperti tampak pada grafik 4.6 bahwa pada tahun 2010 tingkat daya beli penduduk Sumatera Utara secara umum adalah sekitar 636,33 ribu rupiah. Berbeda dengan komponen IPM lainnya yang selalu berada di atas angka rata-rata Sumatera Utara, indikator ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan menempati peringkat ke-23 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.



3.2 Status Pembangunan Manusia

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah kedalam tiga golongan yaitu :

1. **Rendah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kurang dari 50
2. **Sedang atau menengah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 50 sampai 80.
3. **Tinggi** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80 ke atas

Untuk melihat perkembangan IPM daerah kabupaten/kota, tingkatan status Pembangunan Manusia dikelompokkan atas 4 kriteria, dimana status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status IPM dengan kriteria sebagai berikut :



Tingkatan Status	Kriteria
1. Rendah	$IPM < 50$
2. Menengah bawah	$50 \leq IPM < 66$
3. Menengah atas	$66 < IPM < 80$
4. Tinggi	$IPM > 80$

Sedangkan lebih terurai dijelaskan tentang pembagian status indeks pembangunan manusia seperti tergambar dalam gambar berikut ini :

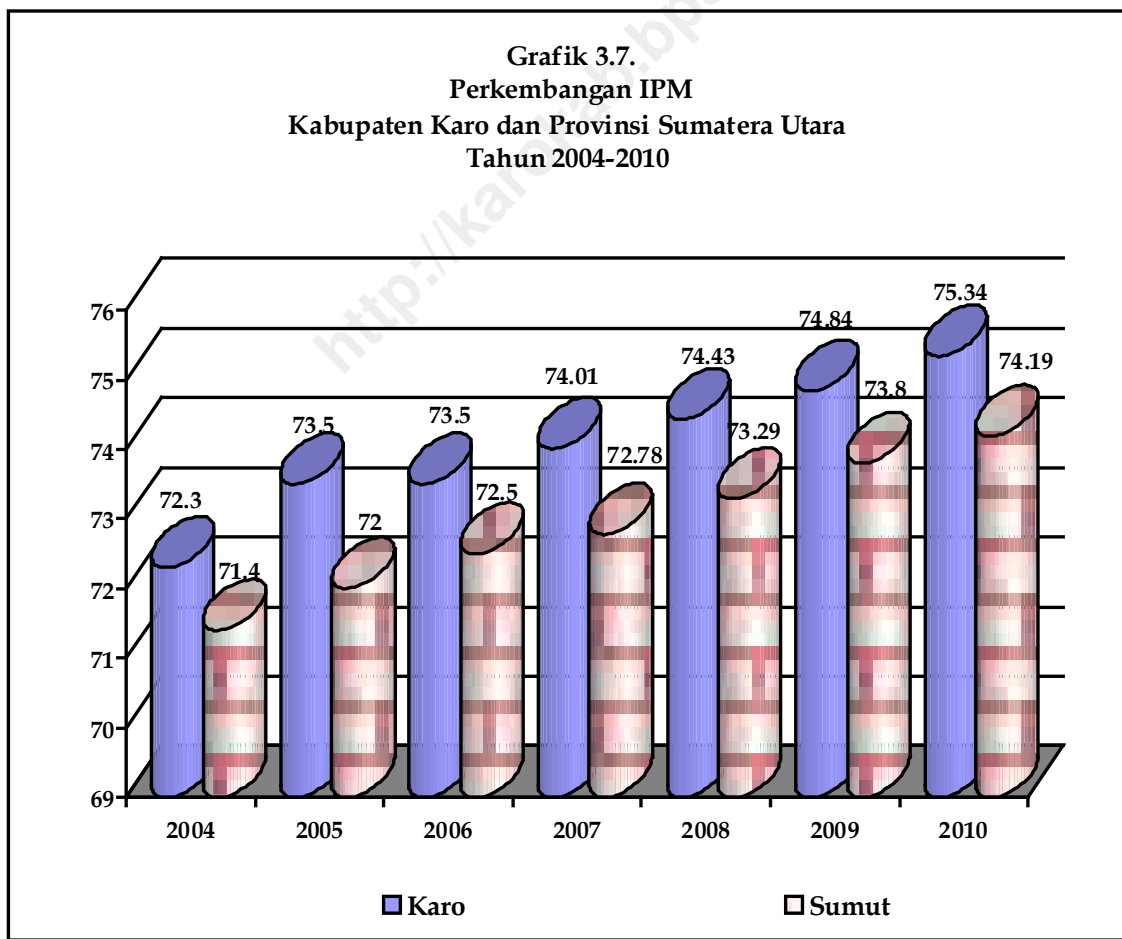
Gambar 3.1 Status Indeks Pembangunan Manusia





Pada Tahun 2009 IPM Kabupaten Karo adalah sebesar 74,84 berada pada status menengah atas dan tahun 2010 meningkat menjadi 75,34 juga berada pada status indeks pembangunan manusia menengah atas.

Dari gambar di bawah terlihat bahwa status indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara juga mengalami kenaikan dari 73,80 pada tahun 2009 menjadi 74,19 pada tahun 2010. Secara umum status IPM Kabupaten Karo dan Sumatera Utara menurut kriteria UNDP adalah menengah atas dengan nilai IPM berada diantara 66 sampai 80.

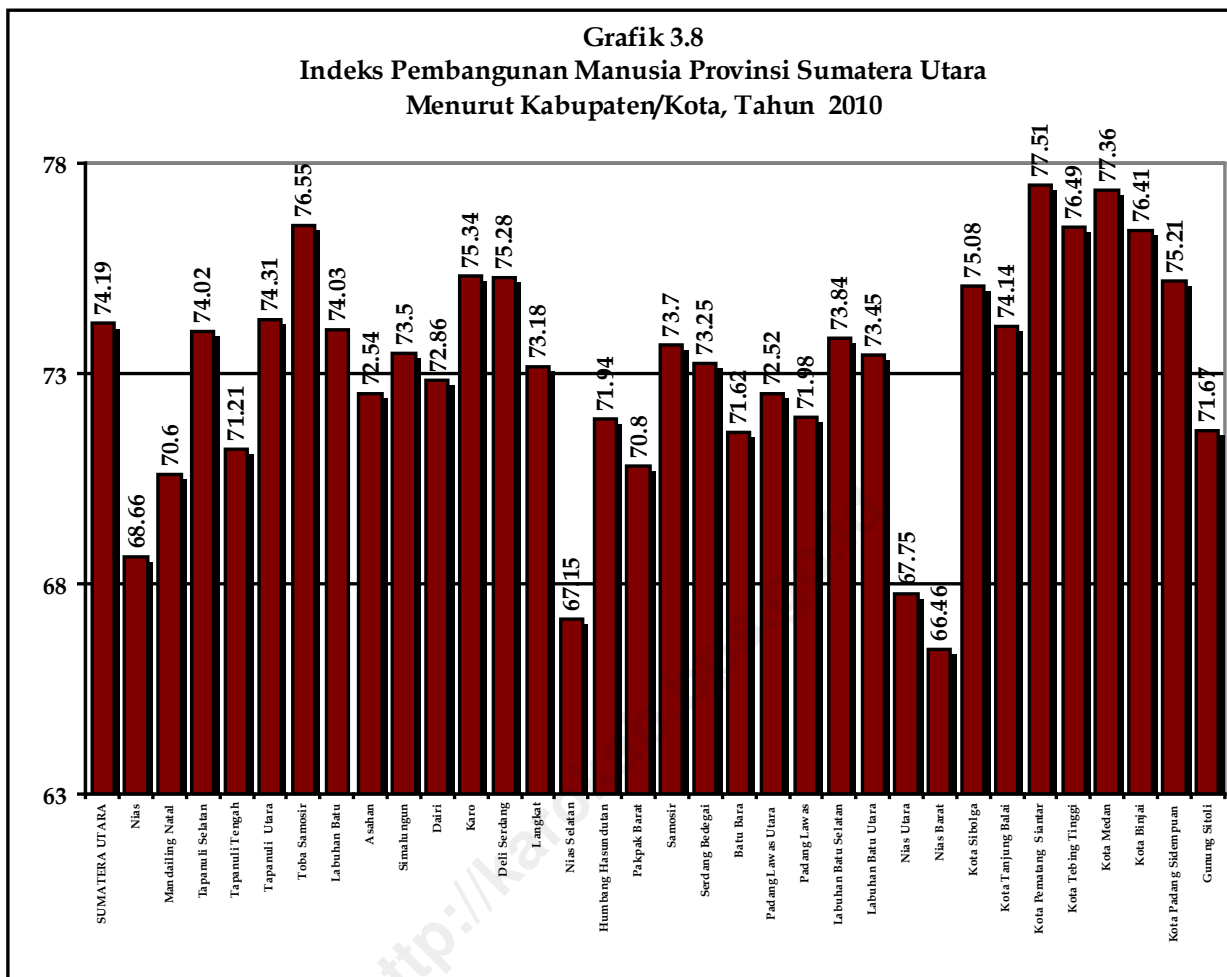




Tabel 3.2
Perkembangan Status Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara
2004 – 2010

Tahun	Karo		Sumatera Utara	
	IPM	Status	IPM	Status
2004	72,3	Menengah atas	71,40	Menengah atas
2005	73,5	Menengah atas	72,00	Menengah atas
2006	73,5	Menengah atas	72,50	Menengah atas
2007	74,01	Menengah atas	72,78	Menengah atas
2008	74,43	Menengah atas	73,29	Menengah atas
2009	74,48	Menengah atas	73,80	Menengah atas
2010	75,34	Menengah atas	74,19	Menengah atas

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.



Namun, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, IPM Kabupaten Karo pada tahun 2010 berada di peringkat ke-6.

Jika berdasarkan status, IPM Kabupaten Karo baik pada tahun 2009 maupun tahun 2010 berada pada golongan menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Karo masih perlu terus ditingkatkan.



3.3 Hubungan IPM dengan Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dapat ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang akan di cantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini akan merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah satu faktor yang menduduki salah satu posisi penting dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan (arti luas), juga meliputi unsur pemantauan, dan evaluasi maka fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya pembangunan yang terarah.

Sebaiknya daerah yang telah memiliki PDRB yang sudah relatif baik fungsi pembangunan adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya tetap kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

3.3.1. HUBUNGAN IPM DENGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam GBHN pembangunan menganut konsep manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia Indonesia seutuhnya menghendaki peningkatan kualitas penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Secara eksplisit mungkin dapat diterjemahkan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu



harus menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau khususnya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik dengan pembangunan manusia. Artinya pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika dalam kondisi perekonomian tidak menentu (labil), seperti yang terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia ini juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan manusia itu sendiri sebagai input, dimana nantinya dihasilkan suatu produk berupa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia dituntut sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan daerahnya.

Hubungan pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar Harga Berlaku) dan pembangunan manusia seperti terlihat pada tabel 3.3 adalah hubungan yang tidak linear. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang memiliki peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati peringkat yang tinggi juga menurut PDRB. Hal ini terlihat di Kabupaten Karo pada periode tahun 2004 – 2010



mengalami kenaikan nilai IPM dan PDRB juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 yang tercatat sebesar Rp 3,27 trilyun menjadi Rp 6,68 trilyun pada tahun 2010. Pada periode 2004 – 2010, IPM Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari 72,30 pada tahun 2004 menjadi 75,34 pada tahun 2010. Walaupun kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada kecendrungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena di asumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi.

Tabel 3.3.
Perkembangan IPM dan PDRB Atas Harga Berlaku
Kabupaten Karo dan Sumatera Utara
2004 – 2010

Tahun	I P M		PDRB	
	Karo	Sumatera Utara	Karo (Trilyun Rp)	Sumatera Utara (Trilyun Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004	72,30	71,40	3,27	118,10
2005	73,50	72,00	3,68	139,62
2006	73,50	72,50	3,98	168,38
2007	74,01	72,78	4,48	181,82
2008	74,43	73,29	5,06	213,93
2009	74,84	73,80	5,65	236,35
2010	75,34	74,19	6,68	275,70

Sumber : BPS Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Karo



3.3.2 IPM DAN PENDAPATAN PERKAPITA

Hubungan timbal balik, walaupun tidak bersifat otomatis, antara pembangunan manusia dan pertumbuhan terlihat pada Tabel 3.4 yang mengkaitkan secara visual antara IPM dengan PDRB per kapita. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hubungan itu tidak linier tetapi mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut : bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan kenaikan angka tersebut cenderung akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB per kapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena jika kenaikan PDRB tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan menghasilkan perubahan pembangunan manusia.

Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi Kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB per kapita. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB per kapita yang sudah relatif tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih



banyak tenaga kerja (angkatan kerja) dan mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya seperti : sekolah, kesehatan, kehidupan yang layak dan lain-lain.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia seperti terlihat pada tabel 3.4 adalah hubungan IPM dengan PDRB per kapita tidaklah linear. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang menempati peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati peringkat yang tinggi juga menurut PDRB perkapita. Di Kabupaten Karo PDRB perkapita terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 Rp. 10.471.676,- di tahun 2005 meningkat menjadi Rp 11.053.053. Tahun 2006 dan 2007 juga mengalami peningkatan menjadi masing-masing tahun sebesar Rp 12.159.040 dan Rp 13.454.304. Demikian juga di tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi sebesar Rp 14.910.658 dan Rp 16.350.256 dan di akhir tahun 2010 meningkat menjadi Rp 19.022.157; Begitu juga dengan Sumatera Utara PDRB perkapita mengalami peningkatan, pada tahun 2004 Rp 9.724.789,- tahun 2008 menjadi Rp 16.813.290; tahun 2009 meningkat menjadi Rp 18.381.013 dan di akhir tahun 2010 menjadi Rp 21.236.780 Walaupun dalam hal ini nilai IPM dan PDRB per kapita sama-sama mengalami kenaikan namun tidak selamanya berarti bahwa PDRB perkapita yang tinggi menjamin akan diikuti oleh nilai IPM yang tinggi juga atau dengan kata lain PDRB perkapita dan IPM tidak dapat dipertukarkan.



Tabel 3.4.
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Karo
dan Sumatera Utara
2004 – 2010 (rupiah)

Tahun	I P M		PDRB per Kapita (Rp.)	
	Karo	Sumatera Utara	Karo	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004	72,30	71,40	10.471.676	9.724.789
2005	73,50	72,00	11.053.053	11.288.501
2006	73,50	72,50	12.159.040	12.684.532
2007	74,01	72,78	13.454.304	14.441.993
2008	74,43	73,29	14.910.658	16.813.290
2009	74,84	73,80	16.350.256	18.381.013
2010	75,34	74,19	19.022.157	21.236.780

Sumber : BPS Kabupaten Karo

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah

B A B IV



BAB IV.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun masih belum merupakan ukuran yang menyeluruh IPM atau Human Development Index (HDI) dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara atau daerah dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian yaitu : produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.
3. Pada tahun 2010 angka melek huruf penduduk Kabupaten Karo (sebagai salah satu komponen IPM), sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, yaitu masing-masing 98,69 persen dan 97,32 persen
4. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (10 tahun ke atas) di Kabupaten Karo sebesar 9,10 tahun, yang berarti secara umum



penduduk di Kabupaten Karo sudah menyelesaikan Sekolah Dasar, bahkan telah menduduki kelas tiga SLTP.

5. Tingkat kesehatan makro penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2010 masih lebih tinggi jika dibanding dengan kondisi Sumatera Utara secara umum hal ini dicerminkan oleh angka harapan hidup penduduk Kabupaten Karo yang relatif lebih tinggi, yaitu masing-masing 72,19 tahun dan 69,50 tahun.
6. Standar hidup penduduk Kabupaten Karo masih relatif lebih rendah dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, hal ini dicerminkan melalui tingkat daya beli penduduk Kabupaten Karo yang masih lebih rendah dari penduduk Sumatera Utara secara umum, yaitu masing-masing 625,48 ribu rupiah dan 636,33 ribu rupiah.
7. Status pembangunan manusia di Kabupaten Karo pada tahun 2010 berada pada tingkat (grid) menengah atas, yaitu pada point 75,34 atau lebih tinggi dibandingkan status pembangunan manusia Sumatera Utara yang telah mencapai point 74,19 walaupun masih dalam kelompok skala yang sama.
8. Adanya peningkatan yang cukup berarti dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Khususnya dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Karo dalam tujuh tahun terakhir (2004-2010), level status pembangunan telah



berada pada kelompok skala menengah atas, yaitu tercatat sebesar 72,30 pada tahun 2004, meningkat menjadi 73,50 pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 angka tersebut tetap bertahan 73,50, kemudian meningkat lagi di tahun 2007 menjadi 74,01 dan di tahun 2008 kembali meningkat menjadi 74,43. Di tahun 2009 angka IPM Kabupaten Karo kembali meningkat menjadi 74,84 hingga di akhir tahun 2010 menjadi 75,34.

9. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan IPM tidak berjalan secara otomatis, dan bersifat linier. Ada kecendrungan dalam jangka panjang peningkatan nilai IPM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pembuatan kebijakan khususnya di bidang pembangunan manusia adalah :

1. Perlu mendapat perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, sejalan dengan visi, misi pembangunan yang telah ditetapkan guna mencapai tingkat melek huruf penduduk sebesar 100 persen. Dengan demikian diharapkan pendidikan dapat menjadi modal dasar dan motor bagi penduduk Kabupaten Karo dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Karo ke depan.



2. Seiring dengan perhatian pada sektor pendidikan, sektor kesehatan juga harus terus menerus mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Karo, walaupun dari hasil penilaian indikator angka harapan hidup Kabupaten Karo lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara secara umum.
3. Perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Mengingat pembangunan ekonomi Kabupaten Karo lebih terfokus kepada ekonomi kerakyatan, maka konsep pemberdayaan, produktivitas, pemerataan, dan kesinambungan sangat tepat di aplikasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yang juga merupakan bagian dari pembangunan manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia mempunyai korelasi – interaksi, oleh karenanya kebijakan menjaga keseimbangan diantara keduanya perlu mendapat perhatian.

TABEL-TABEL

<http://karokab.bps.go.id>





**Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan
Tahun 2010**

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	JUMLAH		Kepadatan (Km ²)
		Penduduk	Rumahtangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mardinding	267,1	17 062	4 399	63,87
2. Laubaleng	252,6	17 713	4 796	70,12
3. Tiga Binanga	160,3	19 900	5 778	12,16
4. Juhar	218,5	13 244	4 194	60,59
5. Munte	125,6	19 686	5 752	156,68
6. Kutabuluh	195,7	10 586	3 386	54,09
7. Payung	47,24	10 837	3 211	229,40
8. Tiganderket	86,76	13 178	3 810	151,89
9. Simpang	93,48	19 015	5 342	203,41
10. Naman Teran	87,82	12 796	3 381	145,70
11. Merdeka	44,17	13 310	3 441	301,33
12. Kabanjahe	44,65	63 326	15 756	1 418,27
13. Berastagi	30,50	42 541	10 524	1 394,78
14. Tiga Panah	186,8	29 319	8 135	156,92
15. Dolat rayat	32,25	8 296	2 210	257,24
16. Merek	125,5	18 054	4 501	143,84
17. Barus Jahe	128,0	22 097	6 322	172,57
JUMLAH	2.127,	350 960	94 938	164,98

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010
BPS KABUPATEN KARO



Tabel 2. Jumlah dan Sex Ratio Penduduk Menurut Kecamatan, dan Jenis Kelamin Tahun 2010

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			SEX RATIO
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mardinding	8 526	8 536	17 062	99,88
2. Laubaleng	8 905	8 808	17 713	101,10
3. Tiga Binanga	9 915	9 985	19 900	99,30
4. Juhar	6 592	6 652	13 244	99,10
5. Munte	9 739	9 947	19 686	97,91
6. Kutabuluh	5 241	5 345	10 586	98,05
7. Payung	5 364	5 473	10 837	98,01
8. Tiganderket	6 434	6 744	13 178	95,40
9. Simpang Empat	9 515	9 500	19 015	100,16
10. Naman Teran	6 522	6 274	12 796	103,95
11. Merdeka	6 682	6 628	13 310	100,81
12. Kabanjahe	30 989	32 337	63 326	95,83
13. Berastagi	21 206	21 335	42 541	99,40
14. Tiga Panah	14 519	14 800	29 319	98,10
15. Dolat rayat	4 108	4 188	8 296	98,09
16. Merek	9 259	8 795	18 054	105,28
17. Barus Jahe	10 902	11 195	22 097	97,38
JUMLAH	174 418	176 542	350 960	98,80

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 3. Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin
Tahun 2010**

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	20 324	19 381	39 705
5-9	20 326	19 227	39 553
10-14	18 619	17 488	36 107
15-19	14 204	13 355	27 559
20-24	11 955	11 648	23 603
25-29	14 348	14 390	28 738
30-34	14 553	14 196	28 749
35-39	13 736	13 635	27 371
40-44	12 041	12 121	24 162
45-49	9 528	10 397	19 925
50-54	7 910	8 501	16 411
55-59	6 094	6 664	12 758
60-64	3 974	4 656	8 630
65+	6 806	10 883	17 689
JUMLAH	174 418	176 542	350 960

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu
Tahun 2010**

KEGIATAN UTAMA	JUMLAH
(1)	(2)
1. ANGKATAN KERJA	221 646
- Bekerja	218 202
- Pengangguran	3 444
2. BUKAN ANGKATAN KERJA	37 683
JUMLAH	259 329

Sumber : SAKERNAS 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama Selama Seminggu Terakhir Tahun 2010

KEGIATAN UTAMA	PERSENTASE
(1)	(2)
1. Pertanian	72,98
2. Industri	2,74
3. Jasa	24,28
JUMLAH	100,00

Sumber : Sakernas 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Karo
Tahun 1993 - 2010**

TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)
1993	40.200	16,20
1996	22.600	8,19
1999	14.400	16,06
2002	67.100	24,66
2003	62.500	20,35
2004	62.142	20,00
2006	71.790	20,96
2007	50.500	14,47
2008	46.050	12,86
2009		
2010		

Sumber : Susenas 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 7. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, Aktivitas Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2010

AKTIVITAS PENDIDIKAN MENURUT KELOMPOK UMUR	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS	100,00	100,00	100,00
- Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,34	3,06	2,18
- Masih Sekolah	22,13	19,05	20,60
- Tidak Sekolah Lagi	76,53	77,89	77,20
PENDUDUK 7-12 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Masih Sekolah	99,12	99,16	99,14
PENDUDUK 13-15 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Masih Sekolah	98,14	96,19	97,28
PENDUDUK 16-18 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Masih Sekolah	74,45	64,46	70,46
PENDUDUK 19-24 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Masih Sekolah	6,88	3,74	5,55

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Status Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2010

STATUS PENDIDIKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	1,34	3,06	2,18
MASIH SEKOLAH	22,13	19,05	20,60
- SD	7,32	8,83	8,06
- SMTP	8,21	5,37	6,81
- SMTA	6,04	4,63	5,34
- Diploma/Sarjana	0,56	0,22	0,39
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	76,53	77,89	77,20
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, dan Jenis Kelamin Tahun 2010

IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak Punya Ijazah	15,65	21,05	18,30
2. SD/MI/Sederajat	27,28	22,87	25,11
3. SLTP/MTS/Sederajat/Kejuruan	24,91	21,35	23,16
4. SMU/MA/Sederajat	22,14	24,77	23,43
5. SM Kejuruan	5,08	4,52	4,81
6. Diploma I/II	0,20	0,91	0,55
7. Diploma III/Sarjana Muda	1,50	2,19	1,84
8. Diploma IV/Sarjana	3,23	2,35	2,79
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 10. Persentase Penduduk Berdasarkan Ada Tidaknya Mendapat Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

ADA TIDAKNYA KELUHAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. YA	23,92	22,75	23,35
2. TIDAK	76,08	77,25	76,65

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 11. Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jenis Keluhan Kesehatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

JENIS KELUHAN KESEHATAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Panas	6,73	5,93	6,34
2. Batuk	14,11	11,28	12,73
3. Pilek	14,93	11,64	13,33
4. Asma/Napas Sesak/Cepat	0,80	1,21	1,00
5. Diare/Buang Air	1,28	1,56	1,42
6. Sakit Kepala Berulang	1,27	1,06	1,17
7. Sakit Gigi	1,17	0,85	1,01
8. Lainnya	5,25	6,79	6,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



Tabel 12. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Jumlah Hari Sakit, dan Jenis Kelamin Tahun 2010

JUMLAH HARI SAKIT	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 3	66,29	65,56	65,95
4 - 7	14,17	18,51	16,17
8 - 14	6,30	4,35	5,40
15 - 21	3,28	1,92	2,65
22 - 30	9,96	9,66	9,82
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 13. Persentase Balita
Menurut Penolong Kelahiran Pertama
Tahun 2010**

PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA	PERSENTASE
(1)	(2)
1 Dokter	10,15
2 Bidan	88,13
3 Tenaga Paramedis Lain	0,00
4 Dukun	0,59
5 Famili/Keluarga	1,13
6 Lainnya	0,00
JUMLAH	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 14. Persentase Balita
Menurut Penolong Kelahiran Terakhir
Tahun 2010**

PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR	PERSENTASE
(1)	(2)
1 Dokter	11,03
2 Bidan	88,38
3 Tenaga Paramedis Lain	0,00
4 Dukun	0,59
5 Famili/Keluarga	0,00
6 Lainnya	0,00
JUMLAH	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 15. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Per Kapita/Bulan
Tahun 2010**

GOLONGAN PENGELUARAN	PERSENTASE PENDUDUK
(1)	(2)
< 80.000	0,00
80.000 – 99.999	0,00
100.000 - 149.999	0,00
150.000 - 199.999	0,20
200.000 - 299.999	7,10
300.000 - 399.999	18,52
400.000 - 499.999	16,04
500.000 +	58,15
JUMLAH	100.00

Sumber : Susenas 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 16. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan
Menurut Jenis Konsumsi Pengeluaran Per Kapita/bulan
Tahun 2010**

Jenis Konsumsi	Pengeluaran/ Kapita/Bulan (Rp)	% Pengeluaran/ Kapita/Bulan
(1)	(2)	(3)
Makanan	375 964	66,55
Bukan Makanan	188 964	33,45
JUMLAH	564 929	100,00

Sumber : Susenas 2010,

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 17. Persentase Rumahtangga
Menurut Luas Lantai (m²)
Tahun 2010**

LUAS LANTAI (m²)	PERSENTAS E
(1)	(2)
< 20	2,34
20 – 49	42,71
50 - 59	13,44
60 - 99	33,38
100 – 149	5,63
150 +	2,49

Sumber : Susenas 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 18. Persentase Rumahtangga
Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tahun 2010**

FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR	PERSENTAS E
(1)	(2)
1 Sendiri	65,52
2 Bersama	5,48
3 Umum	17,27
4 Tidak ada	11,73
JUMLAH	100,00

Sumber : Susenas 2010,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO



**Tabel 19. PDRB dan PDRB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010**

KABUPATEN/ KOTA	PDRB (Trilyun Rupiah)		PDRB PER KAPITA (Rupiah)
	Atas Dasar Harga Konstan	Atas Dasar Harga Berlaku	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	0.51	1.14	8.680.596
2. Mandailing Natal	2.03	3.83	9.449.395
3. Tapanuli Selatan	1.78	3.15	11.921.917
4. Tapanuli Tengah	1.20	2.29	7.370.938
5. Tapanuli Utara	1.61	3.81	13.635.481
6. Toba Samosir	1.77	3.48	20.103.137
7. Labuhan Batu	3.26	7.61	18.333.913
8. Asahan	5.39	11.93	17.854.521
9. Simalungun	5.57	10.36	12.670.540
10. Dairi	2.05	3.78	13.988.884
11. Karo	3.37	6.68	19.022.157
12. Deli Serdang	14.52	39.80	22.231.279
13. Langkat	7.21	17.18	17.758.136
14. Nias Selatan	1.23	2.24	7.737.168
15. Humbang Hasundutan	1.01	2.47	14.395.505
16. Pakpak Barat	0.16	0.33	8.192.597
17. Samosir	1.06	1.67	13.953.708
18. Serdang Bedagai	4.55	9.70	16.315.413
19. Batu Bara	7.39	16.59	44.136.353
20. Padang Lawas Utara	0.78	1.73	7.718.157
21. Padang Lawas	0.75	1.60	7.116.803
22. Labuhan Batu Selatan	2.84	6.29	22.648.778
23. Labuhan Batu Utara	3.16	7.16	21.654.269
24. Nias Utara	0.49	1.13	8.913.989
25. Nias Barat	0.25	0.57	7.023.276
26. Kota Sibolga	0.74	1.54	18.273.656
27. Kota Tanjung Balai	1.40	3.16	20.443.982
28. Kota Pematang Siantar	2.04	4.16	17.739.554
29. Kota Tebing Tinggi	1.17	2.29	15.800.338
30. Kota Medan	35.82	83.32	39.719.021
31. Kota Binjai	2.02	4.95	20.090.526
32. Kota Padang Sidempuan	0.94	2.09	10.932.955
33. Gunung Sitoli	0.87	2.01	15.919.381
SUMATERA UTARA	118.64	275.70	21.236.780

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA



**Tabel 20. Perkembangan IPM dan Komponennya
Kabupaten Karo
Tahun 2009 - 2010**

KOMPONEN IPM	TAHUN	
	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,09	72,19
2. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,09	9,1
3. Angka Melek Huruf (Persen)	98,69	98,69
4. Pengeluaran Riil/Kapita Disesuaikan (Rp. 000)	619,83	625,48
I P M	74,84	75,34

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK



**Tabel 21. IPM Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain Di Sumatera Utara
Tahun 2010**

KABUPATEN/KOTA	IPM
(1)	(2)
1. Nias	68,66
2. Mandailing Natal	70,60
3. Tapanuli Selatan	74,02
4. Tapanuli Tengah	71,21
5. Tapanuli Utara	74,31
6. Toba Samosir	76,55
7. Labuhan Batu	74,03
8. Asahan	72,54
9. Simalungun	73,50
10. Dairi	72,86
11. Karo	75,34
12. Deli Serdang	75,28
13. Langkat	73,18
14. Nias Selatan	67,15
15. Humbang Hasundutan	71,94
16. Pakpak Barat	70,80
17. Samosir	73,70
18. Serdang Bedagai	73,25
19. Batu Bara	71,62
20. Padang Lawas Utara	72,52
21. Padang Lawas	71,98
22. Labuhan Batu Selatan	73,84
23. Labuhan Batu Utara	73,45
24. Nias Utara	67,75
25. Nias Barat	66,46
26. Kota Sibolga	75,08
27. Kota Tanjung Balai	74,14
28. Kota Pematang Siantar	77,51
29. Kota Tebing Tinggi	76,49
30. Kota Medan	77,36
31. Kota Binjai	76,41
32. Kota Padang Sidempuan	75,21
33. Gunung Sitoli	71,67
Sumatera Utara	74,19

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK



**Tabel 22. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain Di Sumatera Utara
Tahun 2010**

KABUPATEN/KOTA	Angka Harapan Hidup
(1)	(2)
1. Nias	69,60
2. Mandailing Natal	63,62
3. Tapanuli Selatan	67,21
4. Tapanuli Tengah	68,11
5. Tapanuli Utara	69,70
6. Toba Samosir	70,68
7. Labuhan Batu	69,54
8. Asahan	68,98
9. Simalungun	68,96
10. Dairi	68,40
11. Karo	72,19
12. Deli Serdang	70,65
13. Langkat	69,07
14. Nias Selatan	70,01
15. Humbang Hasundutan	67,87
16. Pakpak Barat	67,60
17. Samosir	69,73
18. Serdang Bedagai	68,98
19. Batu Bara	68,58
20. Padang Lawas Utara	66,57
21. Padang Lawas	67,03
22. Labuhan Batu Selatan	69,95
23. Labuhan Batu Utara	69,62
24. Nias Utara	69,15
25. Nias Barat	69,15
26. Kota Sibolga	70,23
27. Kota Tanjung Balai	70,43
28. Kota Pematang Siantar	72,16
29. Kota Tebing Tinggi	71,33
30. Kota Medan	71,91
31. Kota Binjai	71,77
32. Kota Padang Sidempuan	69,59
33. Gunung Sitoli	69,95
Sumatera Utara	69,50

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK



**Tabel 23. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain Di Sumatera Utara
Tahun 2010**

KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Lama Sekolah
(1)	(2)
1. Nias	6,41
2. Mandailing Natal	7,80
3. Tapanuli Selatan	8,94
4. Tapanuli Tengah	8,13
5. Tapanuli Utara	8,85
6. Toba Samosir	9,80
7. Labuhan Batu	8,53
8. Asahan	7,67
9. Simalungun	8,70
10. Dairi	8,55
11. Karo	9,10
12. Deli Serdang	9,50
13. Langkat	8,76
14. Nias Selatan	6,33
15. Humbang Hasundutan	9,05
16. Pakpak Barat	8,20
17. Samosir	9,52
18. Serdang Bedagai	8,64
19. Batu Bara	7,45
20. Padang Lawas Utara	8,45
21. Padang Lawas	8,13
22. Labuhan Batu Selatan	8,21
23. Labuhan Batu Utara	7,91
24. Nias Utara	6,10
25. Nias Barat	5,56
26. Kota Sibolga	9,63
27. Kota Tanjung Balai	8,81
28. Kota Pematang Siantar	10,85
29. Kota Tebing Tinggi	9,85
30. Kota Medan	10,84
31. Kota Binjai	9,89
32. Kota Padang Sidempuan	10,19
33. Gunung Sitoli	8,42
Sumatera Utara	8,85

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK



**Tabel 24. Angka Melek Huruf Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain Di Sumatera Utara
Tahun 2010**

KABUPATEN/KOTA	Angka Melek Huruf
(1)	(2)
1. Nias	90,44
2. Mandailing Natal	99,33
3. Tapanuli Selatan	99,81
4. Tapanuli Tengah	95,78
5. Tapanuli Utara	98,59
6. Toba Samosir	98,35
7. Labuhan Batu	97,95
8. Asahan	96,90
9. Simalungun	97,50
10. Dairi	98,09
11. Karo	98,69
12. Deli Serdang	98,53
13. Langkat	96,92
14. Nias Selatan	85,20
15. Humbang Hasundutan	98,21
16. Pakpak Barat	96,52
17. Samosir	96,61
18. Serdang Bedagai	97,70
19. Batu Bara	95,25
20. Padang Lawas Utara	99,21
21. Padang Lawas	99,65
22. Labuhan Batu Selatan	98,84
23. Labuhan Batu Utara	98,17
24. Nias Utara	89,19
25. Nias Barat	84,30
26. Kota Sibolga	99,29
27. Kota Tanjung Balai	98,99
28. Kota Pematang Siantar	99,45
29. Kota Tebing Tinggi	98,70
30. Kota Medan	99,36
31. Kota Binjai	99,19
32. Kota Padang Sidempuan	99,70
33. Gunung Sitoli	94,75
Sumatera Utara	97,32

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK



**Tabel 25. Pengeluaran Riil/Kapita Disesuaikan Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain Di Sumatera Utara
Tahun 2010**

KABUPATEN/KOTA	Angka Melek Huruf
(1)	(2)
1. Nias	607,16
2. Mandailing Natal	636,51
3. Tapanuli Selatan	642,53
4. Tapanuli Tengah	618,97
5. Tapanuli Utara	632,74
6. Toba Samosir	646,36
7. Labuhan Batu	635,23
8. Asahan	631,24
9. Simalungun	632,14
10. Dairi	627,70
11. Karo	625,48
12. Deli Serdang	632,41
13. Langkat	628,21
14. Nias Selatan	600,47
15. Humbang Hasundutan	614,37
16. Pakpak Barat	614,58
17. Samosir	623,89
18. Serdang Bedagai	628,82
19. Batu Bara	628,90
20. Padang Lawas Utara	634,18
21. Padang Lawas	625,64
22. Labuhan Batu Selatan	630,27
23. Labuhan Batu Utara	632,42
24. Nias Utara	605,13
25. Nias Barat	607,71
26. Kota Sibolga	629,45
27. Kota Tanjung Balai	624,45
28. Kota Pematang Siantar	634,88
29. Kota Tebing Tinggi	639,39
30. Kota Medan	635,11
31. Kota Binjai	633,37
32. Kota Padang Sidempuan	629,11
33. Gunung Sitoli	611,95
Sumatera Utara	636,33

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Gintings No: 131, Raya, Berastagi

Telp. (0628) 92675, Fax. (0628) 92851

Email: bps1211@mailhost.bps.go.id

Website : karokab.bps.go.id